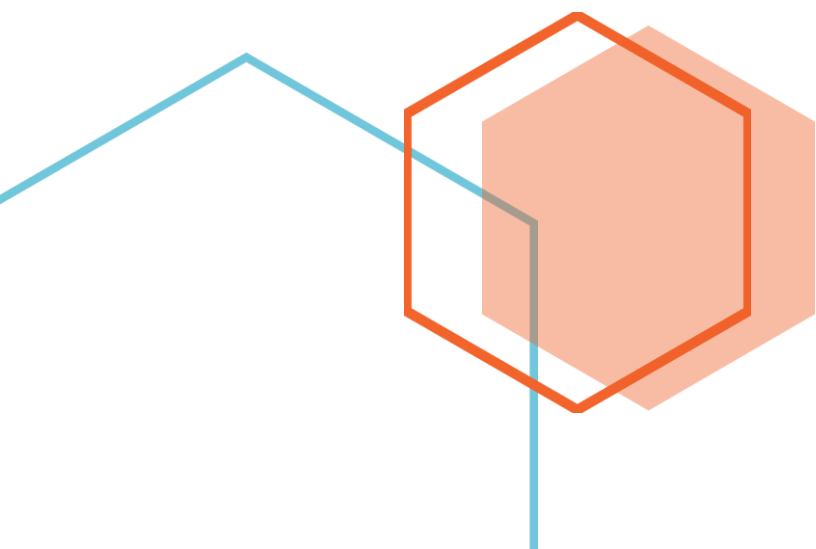




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)  
TAHUN 2019**

---

**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA SEMARANG**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP). Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) maka setiap Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Guna mendorong pencapaian *good governance* berdasarkan azas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang mengharuskan tiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) sebagai langkah untuk mengukur tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja yang telah dicapai, tanpa terkecuali juga Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Tahun 2019.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah sebagai berikut

### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang

Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;

- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari :

### 1. Sekretariat, terdiri dari :

- a). Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b). Subbagian Keuangan dan aset; dan
- c). Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### 2. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :

- a). Subbidang Penetapan dan Pengadaan Pegawai;
- b). Subbidang Pemberhentian Pegawai;
- c). Subbidang Data dan Informasi Pegawai.

4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
  - a). Subbidang Jabatan;
  - b). Subbidang Pengembangan Karier; dan
  - c). Subbidang Penempatan.
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
  - a). Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
  - b). Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Pra jabatan dan Kepemimpinan; dan
  - c). Subbidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
6. Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, terdiri atas :
  - a). Subbidang Kepangkatan dan Penghargaan;
  - b). Subbidang Kesejahteraan; dan
  - c). Subbidang Disiplin.
7. UPTB Pengelola Balai Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Jabatan Fungsional.  
( Struktur organisasi BKPP terlampir ).

### 3. Sumber Daya Manusia

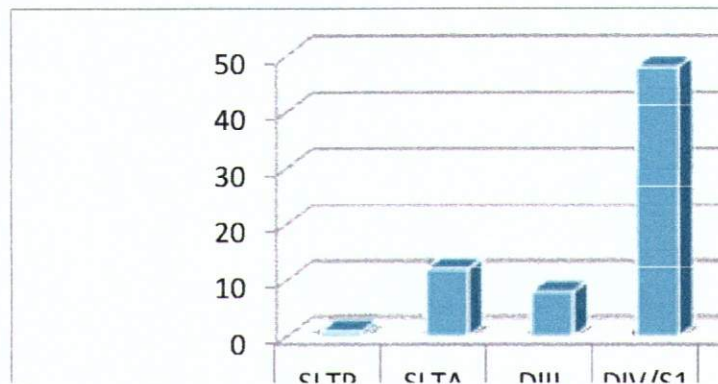
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari Sumber Daya Manusia organisasi tersebut, demikianlah halnya dengan Sumber Daya Aparatur di lingkungan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang merupakan suatu kesatuan individu yang melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna.

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari Sumber Daya Manusia organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta berdaya guna. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berdasarkan keadaan Desember 2019 sebanyak **79 PNS dan 21 Non PNS**, dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan sebagaimana dapat di lihat pada grafik1.1 :

**Gambar 1.1**

**Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berdasarkan Pendidikan**

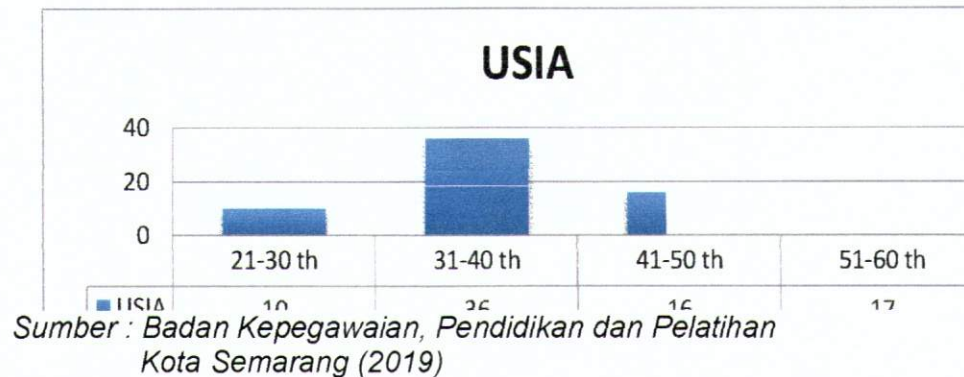


Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (2019)

Dari grafik 1.1. tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik dan potensial. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak **48** orang adalah berpendidikan **Diploma IV** atau **Sarjana (S1)**, **10** adalah berpendidikan **Strata Dua (S2)**, sedangkan untuk tingkat pendidikan **Diploma III** terdapat **8** orang dan **SLTA** sebanyak **12** orang serta 1 orang berpendidikan **SLTP**.



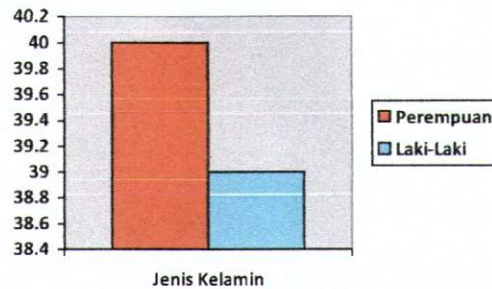
**Gambar 1.2**  
**Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kota Semarang berdasarkan Usia**



Dari grafik 1.2. tersebut diketahui bahwa pegawai atau SDM Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang berusia diantara 31 s/d 40 tahun merupakan kelompok terbesar atau mayoritas yakni sebesar 45,57 % sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sangat ditunjang oleh SDM aparatur yang relatif masih produktif serta etos kerja tinggi yang umumnya ada pada rentang usia tersebut.

Demikian juga bila dikaitkan dengan isu pengarusutamaan-gender (*gender mainstreaming*), maka perbandingan jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang menunjukkan angka mayoritas pegawai berjenis kelamin perempuan sebesar 51,28% untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar Grafik 1.3.

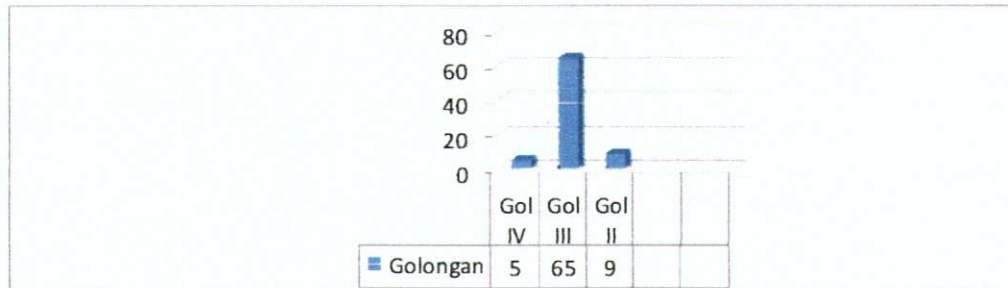
**Gambar 1.3**  
**Jumlah PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Kota Semarang berdasarkan Jenis Kelamin**



*Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Semarang (2019)*

Dari grafik 1.3 diketahui jumlah pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang sedangkan yang berjenis perempuan sebanyak 40 orang. Kemudian bila dilibat berdasarkan golongan diketahui bahwa Golongan IV berjumlah 5 orang, golongan III berjumlah 65 orang, dan golongan II berjumlah 9 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.4 dibawah ini :

**Gambar 1.4.**  
**Keadaan PNS di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan**  
**dan Pelatihan Kota Semarang**  
**berdasarkan Golongan**



*Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Kota Semarang (2019)*

#### 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam rangka membantu pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang :

**Tabel 1.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang**  
**Per Desember 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	AC	103	Baik	BKPP: 6, UPTB : 97
2	Alat Penghancur Kertas	10	(9) Baik (1) Kurang Baik	BKPP: 6, UPTB : 4
3	Almari	52	Baik	BKPP: 30, UPTB : 22
4	Barcode Scanner	1	Baik	BKPP
5	Brankas	12	Baik	BKPP: 8, UPTB : 4
6	CD/DVD Player	2	Baik	BKPP
7	CPU	4	Baik	BKPP
8	Dispenser	11	Baik	BKPP: 5, UPTB : 6
9	Filling Cabinet	32	Baik	BKPP: 20, UPTB : 12
10	Handycam	3	Baik	BKPP: 2, UPTB : 1
11	Mobil	10	Baik	BKPP: 6, UPTB : 4
12	Sepeda Motor	24	Baik	BKPP: 16, UPTB : 8
13	Kamera	8	Baik	BKPP: 4, UPTB : 4
14	Kipas Angin	14	Baik	BKPP
15	Komputer	160	Baik	BKPP: 62, UPTB : 98
16	Kulkas	4	Baik	BKPP: 2, UPTB : 2
17	Kursi	744	Baik	BKPP: 92, UPTB : 652
18	Layar LCD	18	Baik	BKPP: 5, UPTB : 13
19	LCD Proyektor	40	Baik	BKPP: 4, UPTB : 27
20	TV	70	Baik	BKPP: 8, UPTB : 62
21	Meja	577	Baik	BKPP: 129, UPTB : 448
22	Meja Tamu	7	Baik	BKPP: 5, UPTB : 2
23	Mesin Finger Print	14	Baik	BKPP: 6, UPTB : 8
24	Mesin Ketik	14	Baik	BKPP: 6, UPTB : 8
25	Notebook/Laptop	26	Baik	BKPP: 13, UPTB : 13
26	Microphone	11	Baik	BKPP
27	Monitor	12	Baik	BKPP
28	Printer	108	Baik	BKPP: 55, UPTB : 53
29	Roll Opec	17	Baik	BKPP

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
30	Router	1	Baik	BKPP
31	Scanner	6	Baik	BKPP: 5, UPTB : 1
32	Tape recorder	1	Baik	BKPP
33	Trolley	1	Baik	BKPP
34	UPS	67	Baik	BKPP: 16, UPTB : 51
35	Whiteboard	54	Baik	BKPP: 1, UPTB : 53
36	Wireless	9	Baik	BKPP: 2, UPTB : 7
37	Rak	16	Baik	UPTB:1, UPTB : 15
38	Buffet	1	Baik	UPTB
39	Loker	7	Baik	UPTB
40	Genset	1	Baik	UPTB
41	Air Purifier	2	Baik	UPTB
42	CCTV	46	Baik	UPTB
43	Faximile	1	Baik	UPTB
44	Hardisk	6	Baik	BKPP: 1, UPTB : 5
45	Jendela Geser	2	Baik	UPTB
46	Karpet	1	Baik	UPTB
47	Kasur	78	Baik	UPTB
48	Kompor Gas	1	Baik	UPTB
49	Korden	2	Baik	BKPP: 1, UPTB : 1
50	Lampu Sorot	15	Baik	UPTB
51	Lemari Pakaian	40	Baik	UPTB
52	Mesin Cuci	2	Baik	UPTB
53	Mesin Fotocopy	1	Baik	UPTB
54	Mesin Poles Lantai	1	Baik	UPTB
55	Mesin Potong Rumput	3	Baik	UPTB
56	Teralis Bensin	1	Baik	UPTB
57	Vacum Cleaner	2	Baik	UPTB
58	Vertical Blind	4	Baik	UPTB
59	Voice Recorder	1	Baik	BKPP
60	Wallpaper	2	Baik	UPTB
61	Alat Fitnes	1	Baik	UPTB
62	Papan Nama Instansi	3	Baik	UPTB
63	Pesawat Telepon	4	Baik	BKPP: 1, UPTB : 3
64	Podium	6	Baik	UPTB
65	Server	1	Baik	UPTB
66	Side Desk	6	Baik	UPTB
67	Sofa	10	Baik	BKPP: 2, UPTB : 8
68	Sound System	24	Baik	BKPP: 2, UPTB : 22
69	Stand Mic	8	Baik	UPTB
70	Tabung Gas	1	Baik	UPTB

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
71	Tabung Pemadam	2	Baik	UPTB
72	Tangga/ Scaffolding	10	Baik	UPTB
73	Sekat Ruangan Kelas	1	Baik	UPTB
74.	Digital Signage	1	Baik	BKPP
75.	Papan Visual Elektronik	1	Baik	BKPP
76.	Mesin Genset	1	Baik	UPTB
77.	Meja Rapat	2	Baik	BKPP
78.	Alat Fogging	1	Baik	UPTB
79.	Buku Peraturan	4	Baik	BKPP

*Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang (2019)*

### **C. Permasalahan Utama**

Secara umum permasalahan utama dalam pencapaian program dan kegiatan yang dihadapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 203 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

## **D. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

### **(LKjIP)**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kegagalan
- B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja
- C. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **B A B II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 s/d. 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang maupun Renstra Badan Kepegawaian Kota Semarang tahun 2016-2021. Isu-isu strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang yaitu **"Terwujudnya tata kelola aparatur yang baik dan melayani"**.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai terkait dengan pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Kepegawaian,



Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Th 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra perlu ditunjang dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Penjelasan tersebut dapat didiskripsikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera					
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola aparatur yang baik dan melayani	1. Tercapainya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai target 2. Tercapainya Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian sesuai target	Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian	indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian	Meningkatkan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
					Peningkatan kualitas kinerja aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
					Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
		Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aparatur	Optimalisasi pembinaan dan pengembangan aparatur	Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM, peningkatan akurasi administrasi kepegawaian, peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur
			Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang	Peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat serta kelembagaan diklat

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan BKPP Kota Semarang adalah terdiri atas 8 program, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
7. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
8. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, BKPP Kota Semarang menetapkan sasaran strategis yaitu "Peningkatan Kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian".

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Kota Semarang dengan Walikota Semarang Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Sasaran 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	77
Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 2. Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang	>80 Sertifikasi Mutu dan Akreditasi

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2019**

<b>Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Target Capaian</b>
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.400.000	
Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		100 %
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.976.000	
Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100 %
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	42.730.000	

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		100 %
<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>176.017.000</b>	
Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor		100 %
<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>102.572.000</b>	
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100 %
<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>5.000.000</b>	
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100 %
<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>18.980.000</b>	
Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga		100 %
<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>3.794.991.500</b>	
Tersedianya Makanan dan Minuman		100 %
<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>1.387.061.950</b>	
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100 %
<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH</b>	<b>75.375.000</b>	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terseenggara		100 %
<b>Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</b>	<b>414.737.500</b>	
Tersedianya Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		100 %
<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>36.311.000</b>	
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		100 %
<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>212.039.000</b>	

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		100 %
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	295.602.000	
Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		100 %
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	4.600.000	
Pengadaan Televisi		2 unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor		42 buah
Peningkatan kelembagaan SKPD	3.937.500	
Tersedianya Peningkatan Kelembagaan SKPD		100 %
PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	296.099.000	
Tersusunnya Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu		100 %
PENYUSUNAN LKPJ SKPD	11.151.000	
LKPJ SKPD yang tersusun		1 dokumen
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8.069.000	
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun		1 dokumen
PENYUSUNAN LKJIP	7.671.000	
LKj IP yang tersusun		1 dokumen
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	995.000	
Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun		1 dokumen
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	993.200	
Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun		2 dokumen
PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	984.000	

Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun		1 dokumen
<b>PENYUSUNAN RENJA SKPD</b>	<b>11.249.000</b>	
RENJA SKPD yang tersusun		2 dokumen
<b>Penyusunan RKA Perubahan &amp; DPA Perubahan</b>	<b>13.933.000</b>	
RKA Perubahan dan DPA Perubahan yang tersusun		2 dokumen
<b>PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD</b>	<b>15.997.000</b>	
RKA SKPD dan DPA SKPD yang tersusun		2 dokumen
<b>Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi PNS</b>	<b>11.883.000</b>	
Jumlah PNS yang lulus UKPPI		100 %
Jumlah PNS yang lulus ujian dinas		40 orang
<b>Pengembangan Jabatan Fungsional PNS</b>	<b>19.960.000</b>	
Terlaksananya pelantikan jabatan fungsional		3 kegiatan
Terlaksananya kenaikan jabatan fungsional		3 kegiatan
Terlaksananya penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional		3 kegiatan
Terselenggaranya workshop teknis jabatan fungsional		1 kegiatan
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan jabatan fungsional		2 kegiatan
Kenaikan jabatan fungsional yang terlaksana		2 kegiatan
<b>Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah</b>	<b>5.774.500</b>	
Jumlah aparatur yang diberikan cuti, TAPERUM, JKK dan JKM		165 surat
<b>Penyelenggaraan Bintel Aparatur</b>	<b>55.967.000</b>	
Jumlah pelaksanaan bintel aparatur		250 peserta
Jumlah pelaksanaan pelepasan calon jamaah haji		1 kegiatan
Jumlah penyelenggaraan konseling psikolog		96 kegiatan
<b>Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</b>	<b>9.257.600</b>	

Jumlah pelaksanaan sidang kasus kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin		2 angka
Presentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin		3 %
Jumlah surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat keadilan		45 orang
Prosentase PNS yang meminta izin perceraian		1 %
Jumlah PNS yang diberhentikan karena kasus pidana		3 orang
<b>Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS</b>	<b>87.278.000</b>	
Jumlah PNS yang memperoleh izin belajar tepat waktu		80 orang
Pemberian fasilitas tugas belajar kepada PNS		8 orang
<b>Pengembangan Jabatan Struktural PNS</b>	<b>2.022.773.000</b>	
Pemindahan jabatan tinggi pratama		1 kegiatan
Pengambilan sumpah dan pelantikan PNS yang menduduki jabatan struktural		5 kegiatan
Sidang penilai kinerja Pemerintah Kota Semarang		12 kegiatan
Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka		2 kegiatan
Pemutakhiran data jabatan struktural		12 kegiatan
<b>Pembekalan Peningkatan disiplin PNS</b>	<b>56.069.700</b>	
Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan peningkatan disiplin PNS		150 orang
<b>Pengembangan Disiplin PNS</b>	<b>163.673.000</b>	
Jumlah pelaksanaan upacara hari Senin dan apel pagi terpusat		94 kegiatan
Jumlah pelaksanaan sidak disiplin PNS		12 kegiatan
Jumlah pelaksanaan ucapa bendera setiap tgl. 17		5 kegiatan
<b>Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang</b>	<b>41.371.000</b>	



Jumlah PNS yang mengikuti asistensi LHKPN		70 orang
Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah	173.345.000	
Tersusunnya Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah		1 kajian
Penyelesaian Administrasi PNS yang akan purna tugas	78.892.000	
Penyelesaian SK yang tepat waktu bagi PNS yang akan purna tugas		727 orang
Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS	90.630.000	
Tersedianya data kehadiran PNS		10000 PNS
Tersedianya aplikasi e-formasi		1 aplikasi
Terpantaunya data dan aplikasi kepegawaian		2 kegiatan
Tersedianya data kinerja PNS		10000 PNS
Tersedianya portal kepegawaian		1 aplikasi
Tersedianya data utama PNS		10000 PNS
<b>EVALUASI KINERJA PELAYANAN APARATUR</b>	<b>43.936.000</b>	
Pelaksanaan Rakor Kepegawaian dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan aparatur di bidang kepegawaian		4 kali
Jumlah peserta rakor kepegawaian		575 orang
Video interaktif kepegawaian		2 video
Buku Statistik Kepegawaian		125 buku
Kalender untuk rakor		100 buah
Buku Profil		25 buku
<b>PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN</b>	<b>78.363.000</b>	
Terlaksananya pengelolaan arsip kepegawaian		10000 arsip
Tersedianya layanan arsip kepegawaian		12 Laporan
<b>ASISTENSI E-FORMASI</b>	<b>25.089.000</b>	
Jumlah peserta asistensi e-formasi		150 orang

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	101.669.000	
Terlaksananya penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS		100 %
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	37.455.000	
Tersedia KPE		10 kartu
Tersedianya layanan pengurusan karpeg, karis dan karsu		40 buah
Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS		1400 buah
Tersedianya tanda pengenal PNS		10.000 kartu
Tersedianya dokmen SK Konversi NIP		12 dokumen
<b>PENYELESAIAN ADMINISTRASI PENEMPATAN PNS</b>	<b>21.320.000</b>	
Penyelenggaraan tes mutas PNS dilingkungan Pemkot Semarang		3 kegiatan
Jumlah peserta tes mutasi masuk PNS		90 orang
Jumlah petikan SK penempatan mutasi keluar dan masuk		70 surat
Jumlah petik SK penempatan		75 surat
Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai	127.467.000	
Terlaksananya peningkatan kesehatan jasmani pegawai		100 %
Pengadaan CPNSD	4.804.520.000	
Jumlah pelamar yang mengikuti pengadaan CPNSD		7.000 orang
Pemberian Penghargaan Bagi PNS	11.328.000	
Terlaksanya pemberian penghargaan bagi PNS		100 %
<b>PENGIRIMAN DIKLAT PIM TK. II</b>	<b>96.522.000</b>	
Jumlah peserta PIM Tk. II		2 orang
<b>PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK. III</b>	<b>874.513.820</b>	
Jumlah peserta Diklat PIM Tk. III		30 orang
<b>PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM TK. IV</b>	<b>956.826.980</b>	
Jumlah peserta Diklat PIM IV		40 orang

PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	315.406.000	
Terkirimnya Peserta Diklat Teknis dan Fungsional		90 orang
PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN KEUANGAN	433.545.500	
Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan		210 orang
PENYELENGGARAAN DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN	392.553.600	
Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan		210 orang
PENYELENGGARAAN DIKLAT PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	265.965.200	
Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri		820 orang
SINKRONISASI PENGEMBANGAN SDM	47.582.000	
Jumlah kegiatan sinkronisasi pengembangan SDM		1 kegiatan
MONITORING PENINGKATAN KAPASITAS SDM PADA SKPD	47.746.000	
Tersedianya data kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh OPD Pemkot Semarang		100 %
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT	3.952.500	
Jumlah laporan analisis kebutuhan diklat		1 kegiatan
EVALUASI PASCA DIKLAT	30.000.000	
Jumlah Kegiatan Evaluasi Pasca Diklat		3 kegiatan
Jumlah peserta evaluasi pasca diklat		60 orang
KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	62.925.000	
Jumlah kajian penilaian untuk pengembangan lembaga diklat		1 kajian
OPERASIONALISASI UPTB PENGELOLA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.853.492.950	
Operasionalisasi UPTB Pengelola Balai Diklat		12 bulan

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Hingga akhir tahun 2019, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

## 1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1

### Ringkasan Capaian Kinerja IKU tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	77	80,30	104,29	76,58
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	>80	80,90	101,13	84,24
3	Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang	2	2 (Sertifikat akreditasi B untuk penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang, Jasa dan Ujian dan Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 untuk penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan)	100	2

## 2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.2

Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA 2019			REALISASI 2018
				TARGET	REALISASI	%	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	77	77	80,30	100,76	76,58
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	>80	>80	80,90	101,13	84,24
		Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang	2	2	2 (Sertifikat akreditasi B untuk penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang, Jasa dan Ujian dan Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 untuk penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan)	100	2

Pada Tahun 2019 dari ke-3 Indikator Kinerja Utama yang dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah berhasil merealisasikan dari yang telah ditargetkan masing-masing

indikator. Pada Tahun 2019, untuk Indikator Kinerja Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang sudah tercapai begitu juga tahun 2018 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga telah berhasil meraih Akreditasi B dalam Penyelenggaraan Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tahun 2019 telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Diklat penyelenggaraan diklat prajabatan dan kepemimpinan.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2019, masing masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

### i. SASARAN NOMOR 1 : Peningkatan Kualitas Peiayanan Kepegawaian

**Tabel 3.3**

**Ringkasan Target dan Capaian Kinerja Sasaran Ke.1 tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA 2019			REALISASI 2018
			TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Layanan Kepegawaian	77	77	80,30	104,29	76,58

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja dari yang telah ditargetkan pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian di Tahun 2019. Hal ini apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 meningkat karena realisasi tahun 2018

nilai indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian sebesar 76,58.

## 2. SASARAN NOMOR 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

**Tabel 3.4**

**Ringkasan Target dan Capaian Kinerja Sasaran Ke.2 tahun 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA 2019			REALISASI 2018
			TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	>78	>78	78,42	100,54	84,24
2	Status Akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang	2	2	2	100	2

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang adalah berhasil meningkatkan indikator kinerja dari yang telah ditargetkan pada sasaran peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Tahun 2019. Diketahui nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di tahun 2019 sebesar 78,42 , hal ini melebihi dari target yang di tetapkan sebesar 78. Sedangkan di tahun 2019 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang juga telah mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk penyelenggaraan pengelola diklat prajabatan dan kepemimpinan. Dimana di tahun 2018 telah juga mendapatkan Sertifikat akreditasi B untuk penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang, Jasa dan Ujian.



Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	> 80	80,90	101,13	84,24
2	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian	77	80,30	100,76	76,58
3	Prosentase akurasi data kepegawaian	97 %	99 %	102,06	95 %
4	Tingkat ketepatan waktu layanan dan keakuratan produk layanan	97 %	100 %	105,26	100 %
5	Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	0,85%	0,25 %	29,41	0,44
6	Presentase peserta diklat kepemimpinan yang lulus	100 %	98,53 %	98,53	100 %
7	Prosentase peserta diklat prajabatan yang lulus	100 %	100 %	100	0
8	Prosentase peserta diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi	100 %	94,66 %	94,66	198 %
9	Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang	2	2	100	100

Indikator-indikator Kinerja program pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dapat dicapai semua. Namun seperti yang kita ketahui, dalam pelaksanaan dan pencapaian program dan kegiatan tersebut masih menemukan beberapa kendala yang harus segera ditindak lanjuti untuk kelancaran program/kegiatan pada tahun yang akan datang.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, pada tahun 2019 BKPP Kota Semarang didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Semarang. Adapaun Akuntabilitas Keuangan adalah sebagai berikut :

#### **a. Target dan Realisasi Pendapatan**

Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang menargetkan Pendapatan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 51.400.000,- (Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau terealisasi sebesar 128,5 %.

#### **b. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja**

Secara keseluruhan tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 32.833.245.000,- ( Tiga Puluh Dua Milyard Delapan Ratus Tiga

Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan anggaran telah terserap sebesar Rp. 31.539.812.206,- atau 96,06 %. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.293.432.794,- atau sebesar 3,94 %. Apabila dilihat dari per jenis anggaran, realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 11.901.873.737,- atau 95,92 % dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 12.408.721.000,- sedangkan Belanja Langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 20.424.524.000,- direalisasikan sebesar Rp. 19.637.938.469,- atau sebesar 96,15 %. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 786.585.531,- atau sebesar 4,22 % (data terlampir).

**c. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran**

Pada umumnya perhitungan anggaran yang dikembalikan ke Kas Daerah atau sisa lebih anggaran yang dikembalikan ke Kas Daerah merupakan efisiensi dari kegiatan-kegiatan. Sedangkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dikembalikan ke Kasda sebesar Rp. 786.585.531,-.

## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN**

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya **dikategorikan berhasil/baik**, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan baik bahkan ada yang lebih dari target.

### **B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA**

Kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, secara umum adalah masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun sebagaimana diamanatkan di dalam pasal

203 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

### **C. PEMECAHAN MASALAH**

Untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut, solusi yang diambil antara lain adalah dengan memprioritaskan peningkatan anggaran penyelenggaraan diklat di tahun 2020.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Mengetahui dan menyetujui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG



**Dra. LITANI SATYAWATI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610831 198503 2 008

**LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN : 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2018	CAPAIAN TAHUN 2019	
				TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	1 Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Layanan Kepegawaian	77	77	80,30	100,76	104,29	
Rata-rata Capaian Sasaran - 1								
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	2 Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) 3 Status Akreditasi (Sertifikasi) Lembaga Diklat Pemerintah Kota Semarang	> 80	> 80	80,90	100,54	101,13	
Rata-rata Capaian Sasaran - 2								
<b>Total Rata-Rata Capaian Sasaran (1+2)</b>							<b>100,57</b>	<b>102,43</b>